

## **BAB VI PENUTUP**

### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengelolaan anggaran penanggulangan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTT tahun 2020-2022, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pengelolaan anggaran penanggulangan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTT sudah dilaksanakan dengan mengacu pada PP No. 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, yaitu mulai dari tahap perencanaan dan penganggaran dengan menyusun dokumen RKA berdasarkan KUA dan PPAS, tahap pelaksanaan menyusun DPA yang di gunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD, tahap penatausahaan bendahara menyampaikan laporan pertanggungjawaban fungsional maupun administratif, tahap pelaporan dan pertanggungjawaban dengan menyusun 5 laporan keuangan dan laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan daerah., tahap pengawasan dilakukan dalam bentuk evaluasi kinerja baik dari unsur internal BPBD Provinsi NTT, maupun dari eksternal yaitu Inspektorat dan Bappeda.
2. Perencanaan dan pelaksanaan anggaran penanggulangan bencana pada BPBD Provinsi NTT belum sepenuhnya optimal, perencanaan anggaran yang mengalami perubahan pada anggaran murni ke anggaran perubahan

dikarenakan dalam merencanakan anggaran terdapat keterbatasan SDM perencanaan selain itu karena kurang antusiasnya beberapa ASN dalam penyusunan anggaran mengakibatkan perencanaan anggaran menjadi kurang maksimal, dan pada tahun 2022 dikarenakan BPBD Provinsi NTT menyesuaikan ketersediaan fiskal/ketersediaan anggaran daerah, yang mengakibatkan anggaran mengalami fluktuatif, serta pelaksanaan anggaran belum sepenuhnya optimal ditandai dengan kurang lengkapnya bukti fisik DPA dikarenakan terjadi beberapa kali perubahan DPA, dan realisasi yang lebih rendah dari anggaran perubahan yang telah ditetapkan disebabkan anggaran yang ditetapkan ternyata berbeda dengan anggaran yang dibutuhkan pada saat di lapangan, selain itu disebabkan adanya refocusing anggaran dalam rangka percepatan penanganan covid-19.

3. Faktor-faktor penghambat pengelolaan anggaran penanggulangan bencana pada BPBD Provinsi NTT, meliputi faktor eksternal terkait anggaran daerah yang terbatas, serta yang berasal dari faktor internal yaitu tahap perencanaan seperti kurang antusiasnya para ASN dalam penyusunan anggaran, SDM perencanaan terbatas, pada tahap pelaksanaan seperti alokasi anggaran yang tidak merata di setiap bidang, dan pada tahapan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban seperti kendala jaringan internet saat proses input data dalam aplikasi SIPKD.

## 6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam pengelolaan anggaran penanggulangan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTT, antara lain:

1. BPBD Provinsi NTT perlu meningkatkan kerja sama dan komunikasi antar pimpinan dan bawahan, khususnya antar sub bagian perencanaan dan bidang-bidang dengan selalu terlibat dalam rapat saat proses penyusunan anggaran maupun dalam penetapan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. Perlu melakukan perencanaan anggaran sesuai dengan kebutuhan di lapangan supaya dapat direalisasikan sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.
3. Perlu adanya peningkatan SDM melalui bimbingan teknis maupun pelatihan secara berkala kepada pegawai yang belum mempunyai basic pengetahuan khususnya dalam perencanaan dengan begitu SDM yang ada pada BPBD Provinsi NTT dapat sesuai dengan yang dibutuhkan dan dapat membantu memperlancar organisasi dalam melaksanakan tugas maupun fungsinya.